

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN FISKAL DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PAPUA

Jemy Ricardo Parera*

*Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

ARTICLE INFO

Riwayat Artikel:

Diterima 28 Juli 2022

Disetujui 30 Juli 2022

Keywords:

Belanja Daerah
Kebijakan Fiskal
Pertumbuhan Ekonomi
Kesejahteraan

ABSTRAK

Abstract : To find out how much direct and indirect expenditure affects the poverty level through economic growth, To find out how much direct and indirect expenditure affects the HDI level through economic growth, To find out how much direct and indirect expenditure affects the Gini ratio through economic growth. To fulfill the research objectives and test the pre) to facilitate data processing, thus the analysis used determined hypotheses, the analysis used is path analysis in processing the data is the Amos Version 22 Program. The results show that: The direct relationship between direct expenditure variables on economic growth shows a positive but insignificant correlation. The direct expenditure variable has a negative and significant effect on poverty, both directly and through economic growth variables. The results show that the direct expenditure of the Papua provincial government has an indirect effect on the level of poverty in this area. The direct expenditure variable has a positive effect on improving the HDI performance, both directly and through the economic growth variable. That is, the correlation between direct spending on regional inequality shows a positive relationship, both directly and through the economic growth variable., The indirect expenditure variable has a negative relationship with economic growth in the province of Papua. The correlation between indirect spending and the level of poverty in the province of Papua shows negative relationship, both directly and through economic growth. The indirect expenditure variable has a negative correlation with HDI performance, both directly and through the economic growth variable. Furthermore, the indirect expenditure variable has a positive correlation to regional inequality in this area, both directly through the intervening variables of economic growth.

Abstrak : Untuk mengetahui berapa besar belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, Untuk mengetahui berapabesar belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat IPM melalui pertumbuhan ekonomi, Untuk mengetahui berapa besar belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap gini ratio melalui pertumbuhan ekonomi. Untuk memenuhi tujuan penelitian serta menguji hipotesis yang telah ditetapkan maka analisis yang digunakan adalah *path analysis* untuk memudahkan dalam pengolahan data maka sebagai analisis yang digunakan dalam mengolah data tersebut adalah Program Amos Versi 22. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa : Hubungan langsung antara variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif namun tidak signifikan, Variabel belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah provinsi papua mempunyai efek tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di

daerah ini, Variabel belanja langsung mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Artinya, Korelasi antara belanja langsung terhadap ketimpangan regional menunjukkan hubungan positif, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi., Variabel belanja tidak langsung memiliki hubungan negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi papua., Korelasi antara belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di provinsi papua menunjukkan hubungan negative, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi., Variabel belanja tidak langsung berkorelasi negatif terhadap kinerja IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi., Selanjutnya, variabel belanja tidak langsung memiliki korelasi positif terhadap ketimpangan regional di daerah ini, baik secara langsung maupun melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi.

Open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Alamat Korespondensi :

Jemy Ricardo parera,
Ekonomi Pembangunan,
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura
Jl.Beringin Entrop, Jayapura Selatan, Kota Jayapura - Papua
E-Mail : jimmyricardo40@gmail.com

Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan salah satu kondisi utama bagi kelangsungan ekonomi di Indonesia atau suatu negara, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tujuan pembangunan Indonesia. Diharapkan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi nantinya dapat mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakat. Saat ini di hampir setiap negara, pemerintah ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya menciptakan kesehatan fiskal dimaksud, terhadap dua langkah strategis yang harus dipenuhi. Pertama, menurunkan secara bertahap defisit APBN menuju seimbang atau surplus. Kedua, mengusahakan penurunan jumlah (*stock*) utang publik dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto.

Strategi penurunan defisit anggaran pada dasarnya harus ditempuh melalui dua langkah pokok, yaitu (a) peningkatan penerimaan negara, terutama yang berasal dari sektor perpajakan, dan (b) pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja negara. Sementara itu, penurunan rasio utang publik terhadap Produk Domestik Bruto dapat dilakukan antara lain melalui strategi pengelolaan utang dan pemilihan alternatif kebijakan pembiayaan yang tepat, dalam rangka penurunan rasio utang, dan meningkatkan pendapatan nasional.

Aplikasi kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dalam perkembangannya melahirkan suatu bauran kebijakan (*policy mix*) yang kemudian menyebabkan berkembangnya kajian-kajian tentang koordinasi kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa kajian tentang koordinasi kebijakan tersebut menemukan bahwa, dalam jangka panjang kebijakan fiskal dan moneter tidak bertentangan satu sama lain dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Pada kondisi ini tidak diperlukan adanya koordinasi kebijakan (Hagger,2003). Dalam jangka pendek, tidak adanya koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter akan menyebabkan efektivitas kebijakan menjadi berkurang (Giavazzi,2003).

Dalam teori, terutama pada teori Keynesian tertentu, kebijakan fiskal dan moneter secara efektif mempengaruhi output riil. Kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu melalui stimulus fiskal, dapat meningkatkan permintaan agregat melalui konsumsi domestik dan investasi. Dalam kondisi kekakuan harga, output jangka pendek riil akan meningkat. Di tengah permintaan global yang lemah akibat krisis keuangan global, stimulus fiskal dapat menganalisis perekonomian domestik. Selanjutnya, permintaan agregat yang kuat dapat memberikan efek berlipat-lipat dan meningkatkan pasokan agregat di sektor riil, sesuai dengan ekonomi di bawah kapasitas (*undercapacity economy*), sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan output dalam jangka pendek.

Di tengah pandangan yang saling bertentangan mengenai efektivitas kebijakan fiskal dan moneter yang *counter-cyclical*, pemerintah dan bank sentral di seluruh dunia terus berpendapat bahwa kebijakan fiskal dan moneter merupakan salah satu pilihan dalam mengatasi krisis ekonomi akibat krisis, sebagaimana tercermin dari defisit fiskal yang sedang berkembang dan penurunan suku bunga di seluruh dunia.

Stabilitas ekonomi makro merupakan faktor fundamental untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi makro tersebut dilakukan melalui langkah-langkah tertentu untuk memperkuat daya tahan perekonomian domestik terhadap berbagai gejolak (*shocks*) yang muncul, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Koordinasi kebijakan fiskal, moneter, sektor riil, dan daerah mutlak diperlukan untuk mengantisipasi gejolak perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi. (Luckett, 1977)

Di sisi moneter, upaya tersebut disertai dengan program kegiatan pembangunan yang dalam pelaksanaannya diharuskan menyertakan langkah-langkah untuk mengendalikan laju inflasi dan stabilitas nilai tukar. Meskipun dalam Semester I tahun 2009, tekanan kenaikan harga beberapa komoditas pangan pokok dan komoditas energi dan pertambangan dunia menurun, perkembangannya pada akhir tahun 2009 dan tahun 2010 perlu tetap diwaspadai.

Perkembangan perekonomian Indonesia akan dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan dibidang fiskal dan moneter. yaitu menyangkut pengeluaran pemerintah (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan) jumlah uang beredar dan juga kebijakan tentang pajak. Dalam kenyataannya kebijakan pemerintah dalam bidang fiskal dan moneter juga tergantung pada kondisi perekonomian, dimana kebijakan fiskal dan moneter berbeda pada saat kondisi sebelum krisis ekonomi terjadi dan kebijakan setelah krisis ekonomi terjadi. Bidang fiskal dan moneter terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Kebijakan fiskal melalui pengeluaran pemerintah dalam APBD Papua diharapkan dapat menstimulus produk domestik bruto. Pengeluaran pemerintah dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Konsumsi dan investasi merupakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB). Pengeluaran rutin pemerintah digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan mengarah kepada konsumsi sedangkan pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi. Hal ini menuntut produktivitas masing-masing komponen pengeluaran pemerintah untuk dapat memberikan kontribusi kepada PDRB untuk periode berikutnya secara berkesinambungan. Tentunya pengeluaran komponen tersebut harus dialokasikan kepada pengeluaran-pengeluaran yang bersifat produktif dan investasi, ini menjadi alasan penulis melakukan penelitian ini dengan memfokuskan hanya pada pengeluaran pemerintah melalui kebijakan fiskal dan kebijakan moneter melalui instrument-instrumen; jumlah uang beredar, nilai tukar, tingkat suku bunga dan tingkat inflasi.

Demikian juga dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di harapkan dapat menekan tingkat kemiskinan, tetapi fenomena yang terjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga disertai dengan angka kemiskinan yang tinggi juga.

Rumusan Masalah

1. Berapa Besar belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi?
2. Berapa Besar belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap tingkat Index Pembangunan Manusia (IPM) melalui pertumbuhan ekonomi?
3. Berapa Besar belanja langsung dan belanja tidak langsung berpengaruh terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi?

Tinjauan Pustaka

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal pada dasarnya merupakan kebijakan yang mengatur tentang penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara bersumber dari pajak, penerimaan bukan pajak dan balikan penerimaan yang berasal dari pinjaman/bantuan dari luar negeri sebelum masa reformasi dikategorikan sebagai penerimaan negara. Pinjaman luar negeri dimasukkan dalam APBN sifatnya hanya *in and out*, artinya penerimaan dari sumber ini akan tercantum sebagai penerimaan negara dalam tahun anggaran yang sama, merupakan sumber pengeluaran pembangunan untuk membiayai berbagai proyek pembangunan dalam jumlah yang sama. Kebijakan Fiskal berisi dua instrument pokok dalam makro ekonomi, yaitu pengeluaran pemerintah (*goverment expenditure*) yang dan sistem perpajakan; yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah adalah seluruh pembelian atau pembayaran barang dan jasa untuk kepentingan nasional, sementara sistem perpajakan memiliki dua peranan yaitu mengurangi jumlah pendapatan masyarakat dan mempengaruhi tingkat output potensial (Adisasmita, 2008)

Pendekatan Tentang Konsep Pengeluaran Pemerintah

Aspek pengeluaran pemerintah dalam kajian tentang keuangan Negara maupun daerah merupakan aspek dari penggunaan sumber daya ekonomi secara langsung yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan secara tidak langsung yang dimiliki oleh masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya. Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut terdapat berbagai teori yang menjelaskan tentang pengeluaran pemerintah, teori-teori tersebut dapat di bagi menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro, secara mikro tujuan dari teori perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik.

Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Lebih lanjut, perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro dapat dijelaskan dengan beberapa faktor yakni perubahan permintaan akan barang publik, perubahan dari aktivitas pemerintah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, perubahan kualitas barang publik, perubahan harga faktor-faktor produksi. Barang dan jasa publik yang disediakan oleh pemerintah memilih jumlah barang/jasa yang dihasilkan. Selain itu, pemerintah juga menentukan jumlah pajak yang akan dikenakan kepada masyarakat untuk membiayai barang/jasa publik tersebut dalam menentukan jumlah barang dan jasa publik yang disediakan.

Mazhab Analitis, teori yang tergabung dalam mazhab ini berusaha mengungkapkan proses pertumbuhan ekonomi secara logis dan konsisten, tetapi sering bersifat abstrak dan kurang menekankan kepada aspek empiris (*histories*). Teori Pertumbuhan Klasik, ahli-ahli ekonomi yang tergabung dalam kelompok ini adalah Thomas Robert Malthus, Adam Smith dan David Ricardo. Terdapat empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah, kekayaan alam dan teknologi yang digunakan, Smith (dalam Sukirno, 2000) menyatakan bahwa mekanisme pasar akan menciptakan suatu suasana yang mengakibatkan perekonomian berfungsi secara efisien.

Model Pembangunan dan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dalam Teori Peacock dan Wisman.

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi. Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

Teori Peacock dan Wiseman teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah (*Analysis of government expenditure receipts*). Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Model Pembangunan dan Perkembangan Pengeluaran Pemerintah dalam Teori Rostow dan Musgrave.

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Teori Peacock dan Wiseman

Mangkoesobroto (1997) menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kredibilitas sistem pemerintah, apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori pengeluaran makro dan mikro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian yaitu; model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, Hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah dan Teori Peacock & Wiseman (dalam Mangkoesobroto 1988). Teori perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tahap awal, menengah dan lanjut. Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap *Gross National Product* (GNP) semakin besar dan persentase pemerintah semakin kecil. Pada tingkat yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Lain halnya dengan hukum Wagner yang justru mengemukakan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintahpun meningkat.

Keynesian menekankan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatasi fluktuasi kegiatan ekonomi dan menciptakan kestabilan serta pertumbuhan ekonomi, kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, akan tetapi Keynesian lebih mementingkan pada kebijakan fiskal, anggaran belanja umumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu anggaran belanja tidak langsung dan anggaran belanja langsung, dimana besarnya alokasi anggaran pengeluaran pemerintah didasarkan pada jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat pendapatan, potensi ekonomi, kecerdasan dan tingkat kemahalan.

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai "kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: *pertama*, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; *kedua*, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; *ketiga*, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu "proses" bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat, disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.

Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow-Swan

Menurut teori ini garis besar proses pertumbuhan mirip dengan teori Harrod-Domar, dimana asumsi yang melandasi model ini yaitu: 1. Tenaga kerja (atau penduduk) tumbuh dengan laju tertentu, 2. Adanya fungsi produksi $Q = f(K, L)$ yang berlaku bagi setiap periode, 3. Adanya kecenderungan menabung (*propensity to save*) oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai proporsi (s) tertentu dari output (Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S juga naik, dan sebaliknya, 4. Semua tabungan masyarakat diinvestasikan $S = I = \Delta K$. Sesuai dengan anggapan mengenai kecenderungan menabung, maka dari output disisakan sejumlah proporsi untuk ditabung dan kemudian diinvestasikan. Dengan begitu, maka terjadi penambahan stok kapital (Jhingan, 2004).

Solow menganggap output di dalam perekonomian sebagai suatu keseluruhan, sebagai satu-satunya komoditi, dimana laju produksi tahunannya dinyatakan sebagai $Y(t)$ yang menggambarkan pendapatan nyata

masyarakat, sebagaimana dari padanya dikonsumsi dan sisanya dan sisanya ditabung dan diinvestasikan, bagian yang ditabung S adalah konstan dan laju tabungan adalah $sY(t)$. $K(t)$ adalah stok modal, jadi investasi netto adalah laju kenaikan stok modal ini yaitu dk/dt atau K dengan demikian persamaan pokoknya adalah $K = sY$.

Model Solow dapat menunjukkan arah pertumbuhan keadaan mantap serta situasi pertumbuhan jangka panjang yang ditentukan oleh peranan tenaga kerja dan kemajuan teknologi yang semakin luas, seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa model pertumbuhan Solow menunjukkan bagaimana pertumbuhan dalam *capital stock*, pertumbuhan tenaga kerja dan perkembangan teknologi mempengaruhi tingkat *output*, untuk menjelaskan teori pertumbuhan Solow maka pertama akan dianalisis bagaimana peranan stok modal dalam pertumbuhan ekonomi dengan asumsi tanpa adanya perkembangan.

Pandangan Konservatif

Golongan konservatif merasa yakin bahwa ekonomi pasar bebas bisa berhasil dengan sangat baik. Walaupun gejolak yang ada cepat menghantam sistem pasar, gejolak tersebut seringkali tidak meminta korban dan mengarah pada penyesuaian yang ditunjukkan oleh sistem pasar. Sebagai contoh harga-harga relatif yang menyingkat pada sektor yang sedang berada di dalam puncak kejayaan akan menarik sumber daya dari sektor yang sedang menurun. Akibatnya, sumber daya (dan terutama tenaga kerja) biasanya tetap sepenuhnya bekerja sehingga kebijakan untuk menangani pengangguran tidak diperlukan. Golongan konservatif berpendapat bahwa situasi makro ekonomi akan sangat memuaskan bila seluruhnya ditentukan oleh mekanisme sistem pasar bebas.

Tentu saja hanya sedikit yang percaya bahwa sistem pasar berfungsi secara sempurna, sehingga mampu menjamin keadaan penggunaan tenaga kerja yang terus-menerus. Namun terdapat pemikiran yang menyatakan bahwa sistem pasar berfungsi cukup bagus untuk menghalangi setiap peran konstruktif pada kebijakan pemerintah. Disamping itu banyak ahli ekonomi dari golongan konservatif percaya bahwa instrumen kebijakan bersifat demikian sederhana, sehingga pelaksanaannya acap kali kontra produktif. Suatu kebijakan pemerintah mungkin saja memberikan pengaruh yang tidak pasti, baik kekuatan maupun saat diberlakukannya, sehingga sering kali lebih bersifat merusak dari pada meningkatkan keadaan ekonomi. Dalam perekonomian modern, peran pemerintah dalam beberapa bidang sudah bisa dipastikan. Maka pandangan mengenai tidak perlunya campur tangan pemerintah adalah sesuatu hal yang tidak mungkin, yang lebih mungkin adalah golongan konservatif menyarankan campur tangan langsung pemerintah yang minimum terhadap sistem pasar. Ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang stabil yang mana sektor swasta dapat berperan

Pandangan Intervensionis

Golongan *intervensionis* yakin bahwa berfungsinya ekonomi pasar bebas acap kali jauh dari memuaskan. Terkadang pasar memperlihatkan kelemahan dalam mengatur dirinya sendiri, dan terjebak ke dalam periode yang sarat dengan pengangguran yang parah. Disaat lain, pasar cenderung terlalu cepat (*overcorrect*) sehingga mengakibatkan ekonomi terperosok diantara 2 ekstrim senjang resesi yang parah dan senjang inflasi yang berat. Perilaku seperti ini dapat diperbaiki, demikian pula golongan *intervensionis*. Walaupun kebijakan *intervensionis* bisa saja tidak sempurna tetapi mungkin cukup baik untuk meningkatkan berfungsinya ekonomi dalam kaitannya dengan tiga sasaran pokok kebijakan.

Pandangan Kaum Moneteris

Kaum moneteris merasa yakin bahwa perekonomian pada dasarnya bersifat stabil karena fungsi pengeluaran sektor swasta relatif stabil. Selain itu mereka juga yakin bahwa pergeseran kurva permintaan agregat terutama disebabkan oleh perubahan-perubahan jumlah uang yang beredar akibat kebijakan pemerintah. Pandangan bahwa siklus ekonomi merupakan akibat dari sebab-sebab moneter didasarkan pada bukti yang diajukan oleh Friedman dan Schwartz (1960) dalam karya monumental mereka *Monetary History of the United-States, (1867-1960)* mereka menemukan korelasi kuat antara perubahan jumlah uang beredar dan peredaran tingkat peredaran ekonomi. Resesi-resesi besar dikaitkan dengan penurunan absolut jumlah uang beredar dan resesi-resesi kecil dikaitkan dengan makin lambannya tingkat penambahan jumlah uang beredar kurang dari kecenderungan jangka panjang.

Pandangan Pengikut Keynes (*Grand Theory*)

Pandangan kalangan Keynes (1936) mengenai fluktuasi, siklikal, dalam ekonomi memiliki dua bagian. Yang pertama penekanan pada variasi (naik turunnya) investasi sebagai akibat dari siklus ekonomi dan sebab-sebab *non-moneter* dari variasi semacam itu. Kalangan Keynes (1936) menolak pendapat yang mereka sebut pandangan moneteris ekstrim bahwa hanya uanglah yang di permasalahkan dalam menjelaskan fluktuasi siklikal. Banyak kalangan Keynes (1936) percaya bahwa baik kekuatan moneter maupun *non-moneter* merupakan faktor penting dalam menganalisis perilaku siklikal ekonomi. Walaupun mereka

menerima mismanajemen moneter yang serius sebagai salah satu sumber potensial bagi fluktuasi ekonomi, mereka tidak percaya bahwa hanya itulah satu-satunya penyebab utama.

Bertolak dari kebijakan fiskal berisi dua instrument pokok dalam makro ekonomi, yaitu pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) yang dan sistem perpajakan, dan mengenai pembagian kewenangan dan fungsi (*power sharing*) antara pemerintah pusat dan daerah, UU RI nomor 25 tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah yaitu pengaturan pembagian sumber-sumber daya keuangan (*financial sharing*) antara pusat-daerah sebagai konsekuensi dari adanya pembagian kewenangan tersebut, UU RI No. 5 tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, UU RI No. 25 tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU RI No. 33 tahun 2000 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. dengan grand theory adalah melalui *Fiscal mobility theory* dari Jhon Maynar Kynes 1936, dengan model teoritik *Analysis of government expenditure receipts theory* Teori Peacock dan Wiseman (1989).

Teori Kesejahteraan

Menurut Walter A. Friedlander (1961) kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisir dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga yang bertujuan untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan dan relasi-relasi pribadi dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuannya sepuh mungkin dan meningkatkan kesejahteraannya secara selaras dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Menurut Arthur Dunham (1965) kesejahteraan sosial didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan didalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan dan hubungan-hubungan sosial. Pelayanan kesejahteraan sosial memberi perhatian utama terhadap individu-individu, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas dan kesatuan-kesatuan penduduk yang lebih luas; pelayanan ini mencakup pemeliharaan atau perawatan, penyembuhan dan pencegahan.

Harold L. Wilensky (1965) mendefinisikan kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisir dari usaha-usaha pelayanan sosial dan lembaga-lembaga sosial, untuk membantu individu-individu dan kelompok dalam mencapai tingkat hidup serta kesehatan yang memuaskan. Maksudnya agar individu dan relasi-relasi sosialnya memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengembangkan kemampuan-kemampuannya serta meningkatkan atau menyempurnakan kesejahteraan sebagai manusia sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori Kemiskinan

Kritik utama terhadap teori Malthus dan Neo Malthusian, yaitu : 1). Teori itu tidak memperhitungkan peranan dan dampak dari kemajuan teknologi. 2). Teori itu didasarkan pada suatu hipotesis tentang hubungan secara makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan perkapita. 3). Teori itu merupakan perhatian kepada variabel yang keliru yaitu pendapatan perkapita sebagai faktor penentu utama tingkat pertumbuhan penduduk. Faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung : Tingkat kemiskinan cukup banyak, mulai dari tingkat dan laju pertumbuhan output (produktivitas tenaga kerja), tingkat inflasi, tingkat investasi, lokasi serta kualitas sumber daya alam, tingkat dan jenis pendidikan, etos kerja dan motivasi pekerja. Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktor penyebab utama antara lain : 1). tingkat produktivitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja disektor tersebut terlalu banyak, sedangkan tanah, kapital, dan teknologi terbatas serta tingkat pendidikan petani yang rata-ratanya sangat rendah. 2). daya saing petani atau dasar tukar domestik (*term of trade*) komoditi pertanian terhadap out put industri semakin lemah. 3). tingkat diversifikasi usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi nonfood yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dan harga yang lebih baik masih sangat terbatas.

Persoalan kemiskinan, langkah berikut adalah mencari solusi yang relevan untuk memecahkan problem itu (strategi mengentaskan kelompok miskin dari lembah kemiskinan), 1). Konsep Kemiskinan yaitu : kemiskinan absolute, kemiskinan relatif, kemiskinan subyektif. 2). Dimensi Kemiskinan yaitu : perspektif kultural (*cultural perspective*), perspektif struktural atau situasional (*situational perspective*), perspektif kultural mendekati masalah kemiskinan pada tiga tingkat analisis : individual, keluarga, masyarakat.

Strategi besar pembangunan di masa lalu adalah mencapai pertumbuhan yang cepat dengan melakukan *trade-off* terhadap pemerataan, dalam atmosfer strategi ini, memunculkan budaya konglomerasi yang diharapkan akan menghasilkan *trickle down effect* kepada lapisan ekonomi dibawahnya. Pendekatan ini memfokuskan diri pada pembangunan industri secara besar-besaran, dimana kedudukan pemerintah memainkan peran mendorong kekuatan entrepreneur. Permasalahan yang timbul adalah kemacetan

mekanisme *trickle down effect*, dimana mekanisme tersebut sebenarnya sangat diyakini akan terbentuk sejalan dengan meningkatnya akumulasi capital dan perkembangan institusi ekonomi yang mampu menyebarkan kesejahteraan yang merata.

Teori Indeks Pembangunan Manusia

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB dalam situasi nasional dan PDRB dalam situasi regional, hanya mampu menggambarkan pembangunan ekonomi saja. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu parameter yang lebih menyeluruh, yang mampu menggambarkan perkembangan aspek sosial dan kesejahteraan manusia tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000).

Kemajuan bidang ekonomi adalah faktor paling penting dalam sebuah proses pembangunan namun unsur tersebut bukanlah satu-satunya faktor yang dapat mendorong kemajuan sebuah perekonomian. Tapi, pembangunan manusia juga harus menjadi bagian penting dari adanya pembangunan yang biasanya hanya dipandang dari segi finansial dan material semata. Oleh karena itu suatu pembangunan harus dipandang sebagai suatu *proses multi-dimensi* yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem sosial dan ekonomi yang ada (Todaro M. P., Ekonomi Untuk Negara Berkembang, 1994)

Komponen Pembangunan Manusia

Laporan pembangunan sumber daya manusia yang telah dipublikasikan oleh UNDP (*United Nations Development Programme*) dalam bentuk ukuran kuantitatif yang biasa disebut HDI (*Human Development Indeks*). HDI digunakan sebagai tolak ukur pembangunan sumber daya manusia yang dirumuskan secara konstan, dianggap tidak akan pernah memberikan gambaran pembangunan secara menyeluruh. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran HDI adalah sebagai berikut (UNDP, Human Development Report, 1993).

a. Indeks Harapan Hidup (longevity)

Indeks harapan hidup atau disebut juga lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian per tahunnya, dimana variable tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan informasi orang yang meninggal pada periode waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung untuk. Perhitungan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menetapkan standar angka harapan hidup berdasarkan nilai maksimum dan minimumnya.

Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia

Terdapat tiga komposisi indikator yang digunakan dalam mengukur besar indeks pembangunan manusia suatu Negara dalam konsep Indeks Pembangunan manusia yaitu :

- a. Tingkat kesehatan diukur dengan melihat harapan hidup saat lahir (tingkat kematian bayi).
- b. Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga).
- c. Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per tahun.

Menurut Adam Smith sumber daya alam merupakan hal paling utama dari kegiatan produksi masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang ada merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Ketika sumberdaya yang tersedia belum digunakan sepenuhnya maka yang memiliki peranan untuk memberdayakan sumber daya tersebut adalah jumlah penduduk dan stok modal di suatu daerah. Sumber daya manusia memiliki peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Apabila pertumbuhan penduduk tinggi maka akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktifitas setiap penduduk akan berkurang dan pada saat keadaan tersebut terjadi, maka kemakmuran masyarakat menurun.

Menurut David Richardo dan Malthus mempercayai proses pembangunan dalam jangka panjang (*long run*). Menurut mereka dalam jangka panjang perekonomian akan mencapai *stationary state* yaitu keadaan dimana perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali, sedangkan perkembangan penduduk akan menurunkan kembali tingkat pembangunan ke tahap yang rendah. Dimana dalam teori II berlaku “the law of diminishing return” maksudnya adalah dikarenakan keterbatasan tanah, maka apabila terjadi pertumbuhan penduduk (bertambahnya tenaga kerja) akan berakibat menurunnya “*marginal product*”. Keadaan ini akan berakibat pekerja akan menerima tingkat upah yang hanya cukup untuk kebutuhan hidup (DR. Suryana, 2000)

Sedangkan menurut Mill, pembangunan ekonomi terdapat dua faktor yang harus diperbaiki, yaitu perbaikan dalam taraf pengetahuan masyarakat dan perbaikan berupa usaha-usaha untuk menghapus

penghambat pembangunan, seperti kepercayaan, adat istiadat dan berfikir tradisional. (Suryana, Ekonomi Pembangunan, 2000)

Teori Gini Ratio

Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Ada beberapa indikator untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan. Berikut beberapa contohnya.

1. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini biasanya diperlihatkan oleh kurva yang disebut Kurva Lorenz, seperti yang diperlihatkan kurva di bawah ini. Dalam Kurva Lorenz, Garis Diagonal OE merupakan garis pemerataan sempurna karena setiap titik pada garis tersebut menunjukkan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan. Koefisien Gini adalah perbandingan antara luas bidang A dan luas segitiga OPE. Semakin jauh jarak garis Kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya, dan sebaliknya. Pada kasus ekstrim, jika pendapatan didistribusikan secara merata, semua titik akan terletak pada garis diagonal dan daerah A akan bernilai nol. Sebaliknya pada ekstrem lain, bila hanya satu pihak saja yang menerima seluruh pendapatan, luas A akan sama dengan luas segitiga sehingga angka koefisien Gini adalah satu (1). Jadi suatu distribusi pendapatan makin merata jika nilai koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai koefisien Gini mendekati satu. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

2. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS)

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis, dapat menggunakan dua ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu Koefisien Gini (*Gini Ratio*) menurut ukuran Badan Pusat Statistik (BPS).

Para ahli ekonomi pada umumnya membedakan antara dua ukuran utama dari distribusi pendapatan baik untuk tujuan analisis maupun kuantitatif, yaitu:

a. Distribusi pendapatan perorangan (*personal distribution of income*).

Distribusi pendapatan perorangan memberikan gambaran tentang distribusi pendapatan yang diterima oleh individu atau perorangan termasuk pula rumah tangga. Dalam konsep ini, yang diperhatikan adalah seberapa banyak pendapatan yang diterima oleh seseorang tidak dipersoalkan cara yang dilakukan oleh individu atau rumah tangga yang mencari penghasilan tersebut berasal dari bekerja atau sumber lainnya seperti bunga, hadiah, keuntungan maupun warisan. Demikian pula tempat dan sektor sumber pendapatan pun turut diabaikan.

b. Distribusi pendapatan fungsional

Distribusi pendapatan fungsional mencoba menerangkan bagian dari pendapatan yang diterima oleh tiap faktor produksi. Faktor produksi tersebut terdiri dari tanah atau sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Pendapatan didistribusikan sesuai dengan fungsinya seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa dan pemilik modal menerima bunga serta laba. Jadi setiap faktor produksi memperoleh imbalan sesuai dengan kontribusinya pada produksi nasional, tidak lebih dan tidak kurang. Distribusi pendapatan yang didasarkan pada pemilik faktor produksi ini akan berkaitan dengan proses pertumbuhan pendapatan, adapun pertumbuhan pendapatan dalam masyarakat yang didasarkan pada kepemilikan faktor produksi dapat dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Pendapatan karena hasil kerja yang berupa upah atau gaji dan besarnya tergantung tingkat produktifitas.
2. Pendapatan dari sumber lain seperti sewa, laba, bunga, hadiah atau warisan. Sayangnya relevansi teori fungsional tidak mempengaruhi pentingnya peranan dan pengaruh kekuatan-kekuatan di luar pasar (faktor-faktor non-ekonomis) misalnya kekuatan dalam menentukan faktor-faktor harga (Todaro, 2003).

Analisa Data

Pada sub bab ini memperlihatkan hasil olahan data penelitian dengan menggunakan perangkat lunak yaitu program Amos dengan analisis jalur (*path analysis*). Hasil olahan data akan memperlihatkan pengaruh antar variabel eksogen terhadap variabel endogen baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel intervening (*intervening variable*). Seperti yang telah digambarkan pada kerangka pikir sebelumnya

bahwa pengaruh langsung (*direct effect*) diperlihatkan melalui hubungan antara belanja langsung (X_1) dan belanja tidak langsung (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1), kemiskinan (Y_2), IPM (Y_3) maupun terhadap ketimpangan regional (Y_4).

Sedangkan pengaruh tidak langsung, yakni pengaruh belanja langsung (X_1) dan belanja tidak langsung (X_2) terhadap kemiskinan (Y_2), IPM (Y_3) maupun terhadap ketimpangan regional (Y_4), melalui variabel pertumbuhan ekonomi (Y_1). Keterkaitan antar variabel penelitian selanjutnya menjadi dasar untuk memverifikasi dan melakukan komparasi dengan hasil penelitian terdahulu sehingga nampak perbedaan dan temuan baru yang diharapkan memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap pemerintah provinsi papua di masa akan datang. Hasil perhitungan statistik keterkaitan secara fungsional masing-masing variabel eksogen terhadap variabel endogen untuk melihat pengaruh langsung (*direct effect*) maupun pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) melalui variabel antara (*intervening variabel*) dapat kita lihat pada tabel berikut ini: Tabel 5.1. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Pengaruh Langsung Variabel Eksogen terhadap Variabel Endogen

Pengaruh	Estimasi	S.E.	P	Ket.
X_1 Terhadap Y_1	1.160	0.198	0.265	Tidak Signifikan
X_2 Terhadap Y_1	-0.583	0.147	0.569	Tidak Signifikan
X_1 Terhadap Y_2	-7.839	0.023	0.000	Signifikan
X_2 Terhadap Y_2	-3.518	0.017	0.003	Signifikan
X_1 Terhadap Y_3	1.971	0.030	0.069	Signifikan
X_2 Terhadap Y_3	-3.393	0.022	0.004	Signifikan
X_1 Terhadap Y_4	0.558	0.035	0.085	Signifikan
X_2 Terhadap Y_4	2.391	0.026	0.031	Signifikan
Y_1 Terhadap Y_2	-0.949	0.136	0.358	Tidak Signifikan
Y_1 Terhadap Y_3	-0.059	0.501	0.953	Tidak Signifikan
Y_1 Terhadap Y_4	-0.766	0.069	0.456	Tidak Signifikan
Pertumbuhan Ekonomi (Y_1) $R^2 = 0.606$	Kemiskinan (Y_2) $R^2 = 0.959$	IPM (Y_3) $R^2 = 0.581$	Kesenjangan Regional (Y_4) $R^2 = 0.616$	

Sumber: Output Hasil Pengolahan Data, Tahun 2020

Tabel diatas menggambarkan hubungan langsung (*direct effect*) antara variabel eksogen terhadap variabel endogen. Berdasarkan pada hasil pengolahan data dengan menggunakan *path analysis*, menunjukkan bahwa pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua tidak signifikan, begitupa pengaruh langsung antara pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan, IPM dan ketimpangan regional yang tidak signifikan. Disisi lain pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap kemiskinan, IPM dan kesenjangan regional berpengaruh signifikan.

Hasil pengolahan data sebagaimana ditampilkan pada tabel 5.1 diatas, menjadi bahan analisis selanjutnya sejauh mana hubungan langsung dan tidak langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen. Hubungan langsung antara belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif, namun tidak signifikan. Artinya, ketika pertumbuhan ekonomi di provinsi papua meningkat sebesar 1 persen, menyebabkan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 1,60 persen pada tingkat kepercayaan 10 persen.

Pengaruh antara belanja langsung terhadap kemiskinan menunjukkan korelasi yang negatif dan signifikan. Artinya bahwa ketika Pemerintah Provinsi Papua menaikkan belanja langsung sebesar 1 persen, menyebabkan turunnya kemiskinan sebesar 7,83 persen. Hasil ini menunjukkan korelasi yang sangat signifikan dan berpengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan di daerah ini. Selanjutnya pengaruh belanja langsung terhadap nilai IPM menunjukkan korelasi yang positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa, ketika Pemerintah Provinsi Papua menaikkan belanja langsungnya sebesar 1 persen, menyebabkan kenaikan IPM sebesar 1,97 persen. Korelasi ini menunjukkan hubungan yang positif yang berarti bahwa belanja langsung Pemerintah Provinsi Papua telah berkontribusi terhadap IPM di daerah ini.

Korelasi antara belanja langsung terhadap ketimpangan regional di provinsi papua menunjukkan hubungan positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika Pemerintah Provinsi Papua menaikkan belanja langsung sebesar 1 persen, berimplikasi terhadap kenaikan ketimpangan regional sebesar 0,56 persen. Kontribusi positif belanja langsung terhadap ketimpangan regional di Provinsi Papua menunjukkan bahwa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi tidak mempunyai dampak positif untuk mereduksi melebarnya ketimpangan regional di daerah ini.

Sementara itu, pengaruh belanja tidak langsung terhadap variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM dan ketimpangan regional telah dijabarkan pada tabel 5.1 diatas. Berdasarkan tabel dari hasil olahan data menunjukkan bahwa pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi papua menunjukkan korelasi yang negatif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah provinsi papua menaikkan belanja tidak langsung sebesar 1 persen menyebabkan pertumbuhan ekonomi mengalami kemerosotan sebesar 0,58 persen. Meskipun pengaruhnya yang tidak signifikan, akan tetapi

korelasi negatif ini menunjukkan hasil temuan baru pada penelitian ini dan berbeda dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya.

Sementara pengaruh belanja tidak langsung terhadap IPM di provinsi papua menunjukkan hasil negatif dan signifikan. Hasil ini dapat diinterpretasikan bahwa ketika pemerintah provinsi papua menaikkan belanja tidak langsung sebesar 1 persen, justru menyebabkan penurunan nilai IPM sebesar 3,39 persen. Hasil ini cukup menarik untuk ditelisik lebih jauh pada sub bab berikutnya untuk menjabarkan secara rinci akar persoalannya sehingga hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang demikian berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sedangkan korelasi antara belanja tidak langsung terhadap ketimpangan regional menunjukkan korelasi positif dan signifikan. Artinya ketika terjadi kenaikan belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Papua sebesar 1 persen, justru mendorong ketimpangan regional di daerah ini sebesar 2,39 persen. Hasil ini juga tentunya mendorong perdebatan karena berbeda dengan hipotesis dan penelitian-penelitian sebelumnya.

Selain itu, korelasi antara variabel-variabel eksogen terhadap variabel endogen secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi ditampilkan secara rinci pada tabel 5.2 selanjutnya. Pengaruh tidak langsung merupakan akumulasi dari pengaruh langsung antara variabel eksogen dan variabel antara (*intervening variable*) terhadap masing-masing variabel endogen yakni kemiskinan, IPM dan ketimpangan regional di provinsi papua.

Berdasarkan pada hipotesis sebelumnya, hubungan antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung dijelaskan secara empirik melalui teori-teori yang mendasarinya (*grand theory*). Oleh karena itu, untuk memberikan komparasi dengan hasil hipotesis sementara, maka kita perlu melakukan pengolahan data terhadap masing-masing variabel penelitian. Tabel 5.2 berikut ini memperlihatkan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung dan total pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Tabel 5.2 Pengaruh Langsung, Tidak Langsung, dan Total pengaruh Variabel Eksogen Terhadap Variabel Endogen

Pengaruh	Direct Effect	Indirect Effect	Total Effect
X ₁ Terhadap Y ₁	1.160***	-	1.160
X ₁ Terhadap Y ₂	-7.839*	-7.305	-15.144
X ₁ Terhadap Y ₃	1.971***	1.886	3.857
X ₁ Terhadap Y ₄	0.558**	1.360	1.918
X ₂ Terhadap Y ₁	-0.583	-	-0.583
X ₂ Terhadap Y ₂	-3.518	-3.319	-6.837
X ₂ Terhadap Y ₃	-3.393	-3.273	-6.666
X ₂ Terhadap Y ₄	2.391	2.382	4.773
Y ₁ Terhadap Y ₂	-0.949	-	-0.949
Y ₁ Terhadap Y ₃	-0.059	-	-0.059
Y ₁ Terhadap Y ₄	-0.766	-	-0.766

Ket: *** = Sig 1 %; ** = Sig 5 %; * = Sig 10 %

Sumber: Output Hasil Pengolahan Data, Tahun 2020

Tabel 5.2 menggambarkan hasil pengolahan data berdasarkan keterkaitan antar variabel, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui variabel antara ataupun pengaruh total. Dari hasil olahan data ini pula akan menjadi dasar untuk dilakukan perbandingan dengan teori-teori sebelumnya dan hasil penelitian terdahulu yang menjadi rujukan pada penelitian ini. Pada pembahasan selanjutnya akan dipaparkan secara jelas hubungan antar variabel serta kaitannya dengan teori-teori seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya. Perbandingan antara hasil penelitian ini dan hasil penelitian sebelumnya akan menjadi menarik apabila terjadi perbedaan yang signifikan. Begitu pula dengan hipotesis yang dibangun dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terlebih dahulu melakukan penelitian yang sama.

Hasil Penelitian Data

Analisis Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen difungsikan melalui hubungan langsung dan tidak langsung. Berikut ini akan diberikan analisis terkait temuan hasil penelitian melalui hasil olahan data, lalu keterkaitannya dengan teori-teori sebelumnya ataupun penelitian yang sama. Selanjutnya penelitian ini akan menjelaskan hasil temuannya dan kebaruan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Pengaruh langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Hasil pengolahan data menunjukkan pengaruh positif antara belanja langsung pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi papua. Pengaruh langsung antara variabel belanja langsung terhadap

pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh sebesar 0.198 positif namun tidak signifikan. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan penelitian sebelumnya terkait hubungan fungsional kedua variabel ini. Hanya saja temuan dari penelitian ini menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan. Hasil penelitian ini juga telah mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Anton Hendranata (2006); Pramono Hariady (2008); Ilyas (2013); Steffi Ikhsan (2014); Teddy Desly Minggu, (2015); Made Dwi Ratnadi, (2016), tentang pengaruh positif antara belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah yang disalurkan melalui belanja langsung, merupakan bagian dari pengeluaran pemerintah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja ini sifatnya belanja non konsumtif atau berbentuk investasi modal pada proyek-proyek pemerintah, baik dalam bentuk proyek fisik seperti pembangunan jalan raya, bendungan air, atau pun proyek non fisik seperti proyek pengembangan bidang pendidikan, keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Belanja langsung merupakan bagian dari belanja rutin pemerintah yang perubahan nilainya tidak fluktuatif. Seperti misalnya belanja pegawai yang nilainya sudah dapat dihitung secara pasti berapa kebutuhan anggaran setiap tahun dengan jumlah pegawai yang ada, demikian pula dengan belanja barang dan jasa yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan belanja pada masing-masing instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Namun demikian, angka pertumbuhan belanja langsung di provinsi papua mengalami perubahan yang cukup signifikan, hal ini pula yang menyebabkan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak begitu signifikan.

Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengaruh variabel belanja langsung terhadap kemiskinan baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi negatif dan signifikan. Variabel belanja langsung berpengaruh negatif sebesar -7.839 dan signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa ketika anggaran belanja langsung pemerintah provinsi papua dinaikkan, secara tidak langsung berpengaruh terhadap penurunan angka kemiskinan di daerah ini. Hanya saja, transmisinya berpengaruh secara langsung tanpa melalui variabel intervening.

Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal mempunyai dampak signifikan secara langsung terhadap penurunan angka kemiskinan. Hal ini berarti bahwa investasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk belanja modal pada barang publik mempunyai efek pengganda yang lebih baik. Belanja pemerintah seperti pembangunan jalan atau irigasi ternyata berpengaruh secara langsung terhadap kemiskinan di daerah ini, meskipun tidak melalui pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan atau pun perbaikan sarana publik akan berdampak pada kemudahan akses bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonominya sehingga roda perekonomian berjalan dengan baik, dengan sendirinya masyarakat mendapatkan pendapatan dari kemudahan akses ini yang selanjutnya berdampak pada kenaikan pendapatan masyarakat. Kenaikan pendapatan inilah yang menyebabkan turunnya angka kemiskinan di provinsi papua jika belanja langsung dinaikkan.

Hasil penelitian ini telah mendukung dan menguatkan hasil penelitian sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Teddy Desly Minggu, (2015); NI made dwi ratnadi, (2016); Adisti Adila (2009); Nadia Ika Purnama (2017); A. Idham Pananrangi (2010); Sudarlan (2015); Iva Ashari Ananda (2015); dan Novita Dewi (2017). Demikian pula teori-teori sebelumnya yang mendukung hasil penelitian ini.

Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah terhadap IPM

Pengaruh belanja langsung pemerintah provinsi papua terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah positif dan signifikan, Variabel belanja langsung mempunyai pengaruh positif sebesar 1.971 terhadap peningkatan kinerja IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil ini menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah provinsi papua mempunyai dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap IPM daerah ini.

Hasil penelitian ini sekaligus menguatkan hasil penelitian sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Atmojo (2017); Ning Malihah (2018); Iva Ashari Ananda (2015); Novita Dewi (2017); dan Mahirsyah Pradana (2016). Beberapa teori juga sudah melakukan justifikasi ilmiah korelasi antara belanja langsung pemerintah dengan IPM yang menunjukkan korelasi positif.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Amartya Sen mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sudah seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses perluasan dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Sen mengamati bahwa masalah riil dari Negara yang sedang berkembang adalah menurunnya kualitas kehidupan diukur dari rendahnya pendapatan yang menjadi bagian dari komponen IPM. Pembangunan sebagai proses yang memperluas *entitlement* dan *kapabilitas* manusia untuk hidup di daerah tersebut sesuai dengan yang diinginkannya (kuncoro,1997). Dengan demikian, output dari sebuah pembangunan tidak hanya Nampak pada fisik, akan tetapi kualitas SDM menjadi indikator utama.

Pengaruh Belanja Langsung Pemerintah terhadap Ketimpangan Regional

Salah satu sasaran dari anggaran atau belanja pemerintah dalam APBN provinsi papua adalah tercapainya pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kabupaten/kota di provinsi papua. Pengaruh antara belanja langsung terhadap ketimpangan regional sebesar 0.558 menunjukkan hubungan positif, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh belanja langsung pemerintah provinsi papua terhadap ketimpangan regional justru memiliki korelasi positif dan signifikan, baik secara langsung, maupun melalui variable intervening, yakni pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Vebby Yunita (2014) dan Zahra Assagafe (2002) yang menunjukkan korelasi positif antara belanja pemerintah dengan ketimpangan regional. Hasil ini menunjukkan bahwa pendistribusian belanja langsung pemerintah provinsi papua kepada daerah-daerah di kabupaten/kota berjalan dengan baik, sehingga kemanfaatan anggaran tersebut tepat sasaran. Alokasi belanja pemerintah yang tidak tepat sasaran tentunya akan berdampak pada meningkatnya ketimpangan regional yang terjadi di daerah tersebut. .

Salah satu teori ekonomi terkenal yang menganalisis hubungan antara belanja modal (investasi) dan tingkat pertumbuhan ekonomi adalah Teori *Harrod Domar*, yang menyimpulkan adanya hubungan langsung antara besarnya stok modal keseluruhan terhadap output, yang diformulasikan sebagai rasio modal output (*capital output, COR*). Hasil penelitian ini pada intinya mengintrepetasikan hubungan antara investasi terhadap output dimana semakin tinggi peningkatan stok modal, semakin tinggi pula output yang dapat dihasilkan.

Tabel 5.3 Tipologi Klassen Pendekatan Sektoral/Daerah

Kuadran I	Kuadran II
Sektor/Daerah maju/tumbuh dan pesat $gi > g, gki > gk$	Sektor/Daerah maju tapi tertekan $gi < g, gki > gk$
Kuadran III	Kuadran IV
Sektor/Daerah maju yg masih dapat berkembang dgn pesat $gi > g, gki < gk$	Sektor/Daerah relatif tertinggal $gi < g, gki > gk$

Sumber : Syafrizal, 2008

Dimana:

gi : laju pertumbuhn PDRB di propinsi i

gki : pendapatan perkapita propensi i

g : laju pertumbuhn PDRB

k : pendapatan perkapita rata-rata

Menurut tipologi daerah (Kuncoro 2004), daerah dibagi atas 4 klasifikasi

- Daerah cepat maju dan cepat tumbuh adalah daerah yang memiliki laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapitalebih tinggi dari rata-rata wilayah
- Daerah maju dan tertekan adalah daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi dari rata-rata daerah wilayah
- Daerah berkembang cepat adalah daerah memiliki tingkat pertumbuhan, tetapi tingkat perkapita lebih rendah dari rata-rata wilayah
- Daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang rendah.

Williamson dan Indeks Entropy Theil digunakan untuk melihat seberapa besar tingkat disparitas pendapatan antar wilayah untuk mengukur ketimpangan antar wilayah.

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson di provinsi Papua tahun 2015, sebesar 0.63 (nilai yang mendekati 1), maka berdasarkan trand Indeks Ketimpangan Wiliamson, pada tahun 2015 di Papua terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata, tahun 2016 sebesar 0.64 (nilai yang mendekati 1), maka berdasarkan trand Indeks Ketimpangan Wiliamson, pada tahun 2016 di Papua terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata, , tahun 2017 sebesar 0.64 (nilai yang mendekati 1), maka berdasarkan trand Indeks Ketimpangan Wiliamson, pada tahun 2017 di Papua terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata, , tahun 2018 sebesar 0.65 (nilai yang mendekati 1), maka berdasarkan pertumbuhan Indeks Ketimpangan Wiliamson, pada tahun 2018 di Papua terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata, , tahun 2019 sebesar 0.66 (nilai yang mendekati 1), maka trand Indeks Ketimpangan Wiliamson, pada tahun 2019 di Papua terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi, yaitu terjadi pertumbuhan ekonomi antar daerah yang tidak merata,

Indeks Williamson yang terus mengalami perbaikan juga bias diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam pemerataan pembangunan di Papua, hal ini juga terlihat dengan jumlah perkembangan pendapatan

perkapita yang semakin meningkat di Papua saat ini. Indeks Williamson mengalami treus mengalami perbaikan juga bias diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Papua saat ini

Analisis Pengaruh Belanja Tidak Langsung Pemerintah Terhadap Kemiskinan, IPM dan Kesenjangan Regional

Analisis selanjutnya adalah menjelaskan pengaruh belanja tidak langsung sebagai variabel eksogen terhadap kemiskinan, IPM dan ketimpangan regional, Variabel belanja tidak langsung memiliki pengaruh negatif sebesar -0.583 terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi papua. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah provinsi papua. baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi di provinsi papua. Hubungan fungsional atau korelasi antara variabel eksogen terhadap variabel endogen dijelaskan melalui grand teori yang telah dijelaskan sebelumnya dan didukung oleh beberapa hasil penelitian sebelumnya sebagai justifikasi ilmiah terhadap hasil penelitian ini.

Pengaruh langsung Belanja Tidak Langsung Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pengaruh belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan hasil pengolahan data adalah memiliki hubungan negative. Pengaruh antara belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di provinsi papua sebesar -3.518 menunjukkan hubungan negative, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Artinya, apabila belanja tidak langsung pemerintah dinaikkan sebesar 1 persen, menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi sebesar -0,583 persen. Hasil ini jelas bertentangan dengan teori-teori sebelumnya yang menunjukkan hasil sebaliknya. Belanja tidak langsung pemerintah pada prinsipnya menjadi investasi social pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Anton Hendranata (2006) yang menunjukkan hubungan positif antara belanja pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramono Hariady (2008) dan Ilyas (2013) yang menunjukkan korelasi positif dan signifikan pengaruh belanja tidak langsung pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini justru menguatkan hasil temuan yang dilakukan oleh Steffi Ikhsan (2014), yang menunjukkan bahwa belanja langsung tidak mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan sektor yang diteliti, begitu pun dengan alokasi belanja tidak langsung mempunyai korelasi positif namun tingkat signifikansinya masih kurang apabila dilihat secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado.

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan

Pengaruh fungsional antara vaiabel belanja tidak langsung dengan kemiskinan di provinsi papua berdasarkan hasil penelitian ini, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi negatif dan signifikan. Artinya semakin tinggi belanja tidak langsung pemerintah akan berdampak pada penurunan jumlah kemiskinan di daerah ini. Hasil temuan ini menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, seperti A. Idham Pananrangi (2010); *Teddy Desly Minggu*, (2015); dan Nadia Ika Purnama (2017).

Hasil penelitian ini menguatkan pula temuan yang dilakukan oleh Minggu, Rumat dan Rotinsulu (2016), bahwa perkembangan jumlah penduduk miskin memiliki hubungan yang negatif dengan meningkatnya belanja tidak langsung. Semakin besar belanja tidak langsung diharapkan akan makin meningkatkan kegiatan perekonomian daerah (terjadi ekspansi perekonomian) dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentunya akan mengurangi kemiskinan.

Belanja tidak langsung pemerintah yang menyentuh masyarakat menengah kebawah memang mempunyai efek secara langsung terhadap peningkatan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*). Belanja subsidi misalnya akan berdampak secara langsung terhadap peningkatan permintaan masyarakat dan pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Hanya saja, belanja tidak langsung tidak memiliki efek terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini. Hasil ini ditunjukkan oleh pengaruh negatif dan signifikan antara belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini menjadi menarik karena pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sisi permintaan justru tidak ditopang secara langsung oleh belanja pemerintah. Artinya bahwa masyarakat lebih mengharapkan bantuan secara langsung untuk menjaga daya beli mereka. menyatakan bahwa pertumbuhan pengeluaran barang publik dan swasta akan menurunkan kemiskinan lebih cepat apabila mengandalkan belanja public

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Pemerintah Terhadap IPM

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur capaian pembangunan sebuah daerah. Tak terkecuali provinsi

papua yang rata-rata nilai IPM selama 5 (lima) tahun terakhir, yakni 2015-2019, masih berada pada angka 59,06 persen. Angka ini masih jauh dari angka rata-rata nasional.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kontribusi belanja tidak langsung pemerintah provinsi papua terhadap IPM tidak optimal, apalagi dengan variabel pertumbuhan ekonomi. Padahal IPM menjadi ukuran mutlak yang digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan disebuah daerah. Apalagi dalam APBD telah dialokasikan anggaran yang cukup besar untuk mendorong peningkatan IPM. Dengan hasil ini menunjukkan pula bahwa IPM provinsi papua yang dibawah jauh dari rata-rata IPM nasional disebabkan karena rendahnya kontribusi belanja tidak langsung pemerintah terhadap variabel ini.

Pengaruh Belanja Tidak Langsung Pemerintah Terhadap Ketimpangan Regional

Penelitian ini menunjukkan bahwa belanja tidak langsung pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan regional di provinsi papua, baik secara langsung, maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Hasil temuan ini berbeda dengan beberapa temuan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Vebby Yunita (2014) dan Zahra Assagafe (2002) yang menemukan korelasi negative antara belanja pemerintah terhadap variabel ketimpangan regional. Akan tetapi, hasil penelitian ini justru menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alberd Kurniawan Gulo (2017), bahwa terjadi korelasi positif dan signifikan antara belanja pemerintah terhadap ketimpangan regional di Provinsi Jambi dan Bengkulu.

Terdapat banyak penelitian yang dapat menguatkan hasil temuan penelitian ini terkait penyebab adanya korelasi positif antara belanja tidak langsung terhadap ketimpangan regional melalui pertumbuhan ekonomi, salah satunya hasil temuan Sasana (2012). Secara konseptual belanja tidak langsung memang tidak atau kurang menyentuh pada kebutuhan masyarakat umum dalam menjalankan usaha mereka. Namun demikian dengan alokasi penggunaan belanja tidak langsung seperti belanja pegawai yang dilakukan secara tepat, akan menunjang kinerja dari masing-masing unit kerja dalam pelayanan publik, pelayanan publik semakin baik akan menciptakan iklim investasi yang baik dan kondusif sehingga meningkatkan kegiatan perekonomian. Kemudian pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa alokasi belanja tidak langsung yang dilakukan dalam prakteknya tidak tepat sasaran yang pada akhirnya tidak memiliki efek yang baik untuk mengurangi ketimpangan regional di daerah ini.

Padahal dalam alokasi anggaran belanja tidak langsung provinsi papua di dominasi oleh belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan daerah kabupaten/kota. Sudah seyogyanya bantuan anggaran kepada pemerintah daerah ini yang angkanya mencapai 2,2 triliun bisa berdampak pada pengurangan ketimpangan regional yang terjadi antar kabupaten/kota di provinsi papua. Hal ini menjadi catatan dan bahan evaluasi terhadap proses perencanaan anggaran di masa datang untuk memberi porsi yang lebih besar pada pos yang mempunyai efek ganda terhadap perekonomian di daerah ini.

Kesimpulan

1. Pengaruh langsung antara variabel belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menunjukkan korelasi positif namun tidak signifikan. Artinya belanja langsung pemerintah provinsi papua belum memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini selama jangka waktu pengamatan penelitian, yakni tahun 2001-2017.
2. Variabel belanja langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah provinsi papua mempunyai efek tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di daerah ini.
3. Variabel belanja langsung mempunyai pengaruh positif terhadap peningkatan kinerja IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika pemerintah provinsi papua meningkatkan belanja langsung pada sama yang sama mendorong peningkatan IPM di daerah ini.
4. Pengaruh antara belanja langsung terhadap ketimpangan regional menunjukkan pengaruh positif, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Artinya bahwa, belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah provinsi papua telah berkontribusi besar terhadap merosotnya ketimpangan regional di kabupaten/kota yang ada di provinsi papua.
5. Variabel belanja tidak langsung memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi papua. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pemerintah provinsi papua mendorong belanja tidak langsung, justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
6. Pengaruh antara belanja tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan di provinsi papua menunjukkan pengaruh negatif, baik secara langsung maupun melalui pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan

bahwa ketika pemerintah provinsi papua mendorong kenaikan belanja tidak langsung justru menekan laju kemiskinan di wilayah tersebut.

7. Variabel belanja tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kinerja IPM, baik secara langsung maupun melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti bahwa, ketika pemerintah provinsi papua menaikkan belanja tidak langsungnya justru menekan kinerja IPM secara langsung dan berpengaruh terhadap kemerosotan pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
8. Selanjutnya, variabel belanja tidak langsung memiliki pengaruh positif terhadap ketimpangan regional di daerah ini, baik secara langsung maupun melalui variabel intervening pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi catatan tersendiri dari hasil analisa sebelumnya terkait korelasi dari kedua variabel ini.

Implikasi Kebijakan

Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa belanja pemerintah provinsi papua, baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung belum memberikan multiplier effect terhadap variabel ekonomi lain seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan, IPM dan belum mampu mereduksi ketimpangan regional yang terjadi di daerah ini.

Dengan demikian, diharapkan realisasi anggaran belanja langsung pemerintah provinsi Papua antara lain; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal diharapkan memberikan dampak dan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menekan ketimpangan regional yang terjadi di provinsi Papua.

Selain itu, berdasarkan pada hasil temuan dari penelitian ini diharapkan pula realisasi anggaran belanja tidak langsung pemerintah provinsi papua antara lain; belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga diharapkan memberikan dampak dan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan serta meningkatkan indeks pembangunan manusia dan menekan ketimpangan regional yang terjadi di provinsi Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita Raharjo, 2001, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Unhas Makassar
- Afdal, 2005, *Analisis Kemampuan Fiskal Daerah dan Kebijakan Dalam Sumber Pendapatan Daerah Tanpa DBH Minyak Bumi di Kabupaten Kampar*, Thesis ITB Central Library, Ganesha Digital Library.
- Abdulla. 2001. *Analisis Efektivitas Penerapan Kebijakan Moneter dan Fiskal Dalam Perekonomian Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Manajemen. Vol 4 No.1. Januari
- Arni Enggia, 1999. *Analisis Dampak Fiskal Terhadap Keseimbangan Internal Ekonomi Makro Indonesia*. Thesis ITB Central Library, Ganesha Digital Library
- Arief. Sritua. 1993. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. UI-Press, Jakarta.
- Aschauer, D.A., 2000. *Public Capital and Economic Growth: Issues of Quantity, Finance, and Efficiency*. Economic Development and Cultural Change
- Balisacan, 2002. *Analisis Dampak Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keseimbangan Internal Ekonomi Makro Indonesia*. Thesis ITB Central Library, Ganesha Digital Library
- Branson, William H, 1989. *Macroeconomic Theory and Policy*, Third dition, Harper & Row Publisher
- Brata, A.G., dan Z. Arifin, 2003. *Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia*, Media Ekonomi .
- Giavazzi, Malcom, dkk, 2003. *Economic of Development*, fourth edition, W.W Norton & Company
- Gujarati, Damodar, 2004. *Ekonometrika Dasar*. Erlangga, Jakarta
- Hagger. A. J. 1977. *Inflation: Theory and Policy*, MacMillan, London.
- Luckett. D.G. 1977. *Money and Banking*. Second Edition, McGraw-Hill Kogakusha.
- Naury, Sanny, 2005. *Analisis Jumlah Uang Beredar, Suku Bunga Dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia 1970-2002*. Thesis Magister Sains, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Nasution, Armin Rahmansyah, 2005. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi Di Indonesia*. Thesis Magister Ekonomi Pembangunan, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- . Salvatore, Dominic, 1992, *Teori Mikro Ekonomi*, terjemahan oleh: Rudy Sitompul dan Haris Munandar, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Sefarita, Chenny, 2005. *Kebijakan Fiskal, Kebijakan Moneter dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Thesis Magister Sains, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan
- Sukirno, Sadono, 2005. *Makro Ekonomi*. PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Suryadi M. 2006. *Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan*. Prisma .

Suryadarma ,2007*Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Propinsi-Propinsi Di Indonesia*. Thesis Magister Ekonomi Pembangunan, Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara,Medan.

Statistik Ekonomi Indonesia, Terbitan 1990-2010, Badan Pusat Statetik Pusat, Jakarta

Salvatore, Lars E.O. 1992. *“Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Target”* in European Economic Review

1. Gambar Hasil Pengolahan Data Dengan Menggunakan Aplikasi Amos

